

## **LAMPIRAN**

<b>Matrik Jurnal</b>										
No	Peneliti, tahun	Judul penelitian	Variabel				Hasil penelitian	Pemetaan		Keterangan
			Dependent	Independent	intervening	moderating		persamaan	perbedaan	
1	Suryo Pratolo & Binang Sukma Yudha, 2012	PERAN FAKTOR-FAKTOR KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja pegawai</li> <li>• Pengeluaran barang dan jasa</li> <li>• Belanja modal</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Belanja modal berpengaruh positif tetapi pengaruh tersebut secara statistik tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penerimaan pendapatan asli daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	Jurnal Akuntansi dan Investasi Volume. 12 Nomor. 2, halaman: 144-160, Juli 2012

							<p>signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PAD melalui pertumbuhan ekonomi</li><li>• Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD melalui pertumbuhan ekonomi</li><li>• Belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD melalui</li></ul>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							pertumbuhan ekonomi			
2	Afrizal Tahar & Maulida Zakhya, 2011	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	•KEMANDIRIAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Alokasi Umum (DAU)</li> <li>• Pendapatan asli daerah (PAD)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>•PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah</li> <li>•DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah</li> <li>•PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	• Pendapatan asli daerah	•Dana alokasi umum •Kemandirian dan pertumbuhan ekonomi	Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 1, halaman: 88-99, Januari 2011

3	Rezyanti Kobandaha, Heince R. N. Wokas, 2016	ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pajak reklame dan pajak hotel</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penerimaan Pajak Reklame Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 dinilai sangat efektif. Sedangkan Pajak Hotel pada tahun 2012-2014 dinilai efektif, kemudian tidak efektif pada tahun 2015</li> <li>•Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame di Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,75% dalam 4 tahun terakhir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan asli daerah</li> </ul>		Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1461-1472 ISSN 2303-1174
---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

							<p>Sedangkan Pajak Hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,25%. Walaupun kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel hanya kecil tapi dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel dalam tahun 2016 akan mengalami kenaikan.</li> </ul>			
4	Budy P. Resosudarmo and Yogi	Regional Income Disparity in								ASEAN Economic Bulletin Vol. 23, No. 1

	Vidyatta ma, 2006	Indonesia A Panel Data Analysis								(2006), pp. 31-44 ISSN 0217-4472 print / ISSN 1793-2831 electronic  © 2006 ISEAS  DOI: 10.1355/ae23 -1c
5	Andi Arifwang sa Adiningr at, Subhan, Muham mad Nur, 2017	ANALISIS KONTRIBU SI PEMUNGU TAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPAT AN ASLI DAERAH DI DISPENDA KOTA	•Pendapatan asli daerah kota Makassar	•Pajak hotel dan restoran			•Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016 berkisar 7,80% hingga 7,87 % dinilai sangat kurang.  •Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016 berkisar			Jurnal Perspektif p- ISSN: 2355- 0538   Vol.02, Nomor 01   Januari-Juni 2017

		MAKASSAR					8,89 % hingga 12,95 % dinilai kurang.			
6	Indrajati Hertanto dan Jaka Sriyana, 2011	SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Penduduk</li> <li>• Jumlah Industri</li> <li>• PDRB</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah industri, penduduk, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penduduk</li> </ul>	Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, April 2011, hlm.76-89
7	ACMARU L FAJAR, 2017	KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli daerah Kabupaten Pamekasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Hiburan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya presentasi kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pamekasan tahun 2011 sampai 2015 tergolong pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>		AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1, Mei 2017



		KABUPATE N PAMEKAS AN					kriteria sangat kurang.			
8	Iflaha Takaria dan Lilis Ardini, 2017	OPTIMALI SASI PENDAPAT AN ASLI DAERAH TERHADAP PEMBANG UNAN KOTA SURABAYA	•Pembanguna n Kota Surabaya	•Pendapatan Asli Daerah				• Analisis pendapatan asli daerah	•Pembangun an kota	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 11, November 2017 ISSN : 2460-0585
9	Cut Wuri Handaya ni, Muham mad Arfan, Hasan	PENGARU H POTENSI SUMBER PENDAPAT AN ASLI DAERAH, PENETAPA N TARGET	•Pendapatan Asli Daerah	•peningkatan pencapaian target PAD				• Pendapatan Asli Daerah		Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-



10	Himawan Estu Bagijo, 2011	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH PROPINSI DI JAWA TIMUR)	•Otonomi daerah	•Pajak dan retribusi daerah			• Posisi Pajak dan Retribusi Daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (baik kabupaten/kota maupun propinsi) khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah dengan aspek kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan wajibnya.	• Pajak dan retribusi daerah	•Otonomi daerah	PERSPEKTIF Volume XVI No. 1 Tahun 2011 Edisi Januari
11	Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni	ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH	•Pendapatan Asli Daerah	•Pajak daerah •Retribusi Daerah			• Hasil pengujian secara parsial, menunjukan bahwa variabel penerimaan pajak daerah	• Pendapatan Asli Daerah		ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas

	Gst. Putu Wirawati, 2013	DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD SEKABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI				<p>berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa variabel penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.</li> <li>• Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam</li> </ul>		Udayana 5.3 (2013):574-585
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	----------------------------

							peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali			
12	Denny Cessario Sutrisno, 2013	PENGARUH JUMLAH OBYEK WISATA, JUMLAH HOTEL, DAN PDRB TERHADAP RETRIBUSI PARIWISATA KABUPATEN / KOTA DI JAWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Obyek wisata</li> <li>•Hotel</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel jumlah obyek wisata mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi kabupaten/kota di Jawa Tengah.</li> <li>• Variabel jumlah hotel mempunyai pengaruh positif dan signifikan</li> </ul>			<p>EDAJ 2 (4) (2013) Economics Development Analysis Journal</p> <p><a href="http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj">http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj</a> ISSN 2252-6889</p>

		TENGAH					<p>terhadap pendapatan retribusi kabupaten/kota di Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Variabel PDRB per Kabupaten / kota di Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi kabupaten/kota di Jawa Tengah.</li><li>• Variabel jumlah obyek wisata, jumlah hotel, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</li></ul>			
--	--	--------	--	--	--	--	---	--	--	--

							kabupaten / kota di Jawa Tengah.			
13	Novita Eka Anggraini , Muhamad Saifi,Achmad Husaini, 2015	ANALISIS EFEKTIFITAS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TANJUNG DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MOJOKERTO	•Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto	•Retribusi pelayanan Pasar Tanjung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi retribusi pelayanan Pasar Tanjung terhadap Retribusi Daerah Kota Mojokerto tahun 2009-2012 berada pada indikator Sangat Kurang.</li> <li>• Efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung tahun 2009-2012, tahun 2009 efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung 92,49%</li> </ul>			Jurnal Perpajakan (JEJAK)   Vol. 1 No. 1 Januari 2015   perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

							<p>dengan kategori Efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung pada tahun anggaran 2009-2012 berada pada kategori Tidak Berhasil.</li> <li>• Tidak tercapainya target dalam realisasirealisasi tahun berjalan sebagian besar</li> </ul>		
14	Danied Mikha, 2010	ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH	•Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman	•Pajak daerah •Retribusi daerah			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2003-2007 secara garis besar mengalami pertumbuhan</li> </ul>		<p>Kajian Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, Juni 2010 ISSN 1907 – 1442</p>



		KABUPATE N SLEMAN					yang positif dengan tingkat pertumbuhan yang berfl uktuatif dan tingkat pertumbuhan tertinggi untuk pajak daerah			
15	Kankesu Jayantha kumaran and Reetu. 2008	Internatio nal Trade and Regional Income Convergen ce The ASEAN-5 Evidence	•Pendapatan daerah	•Perdagangan Internasional			• Perdagangan Internasional berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan negara maupun pendapatan daerah di suatu negara tersebut.			ASEAN Economie Bulletin Vol. 25, No. 2 (2008), pp. 179-94 ISSN 0217-4472 print / ISSN 1793-2831 electronic  DOI: 10.1355/ae25 -2d
16	Budy P. Resosuda rmo and Yogi	Regional Income Disparity in Indonesia	•Pendapatan Daerah per Provinsi	•Pendapatan Perkapita Negara			• Ketimpangan pendapatan perkapita di Indonesia dinilai sangat parah.			ASEAN Economic Bulletin Vol. 23, No. 1 (2006), pp. 31-44 ISSN

	Vidyatta ma. 2006					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan perkapita bebrapa provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah lebih cepat berkembang pesat dibandingkan dengan provinsi yang kurang memiliki kekayaan alam.</li> <li>• SDA minyak dan gas sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita</li> </ul>		<p>0217-4472 print / ISSN 1793-2831 electronic</p> <p>DOI: 10.1355/ae23 -lc</p>
17	R. S. Smith and Theodore M.	THE POLITICAL ECONOMY OF REGIONAL AND	•Pendapatan Asli Daerah	•Pajak Daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 1969 hingga 1970 Indonesia dapat menerima pendapatan daerah melalui</li> </ul>		Asian Survey, Vol. 11, No. 8 (Aug., 1971), pp. 761-786

	Smith. 1971	URBAN REVENUE POLICY IN INDONESIA					pajak daerah sebesar 98,6%.			
18	Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Jumlah Penduduk</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung. Sedangkan koefisien jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.</li> <li>• Dampak untuk peningkatan dalam upaya</li> </ul>	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.2No.2,Okt ober- Desember201 4 ISSN: 2338- 4603

							mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi diharapkan Belanja Langsung diprioritaskan pada sektor Listrik, Air Minum dan Bangunan, sektor Pengangkutan dan sektor komunikasi tidak berdampak besar pada sektor-sektor lain yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.			
19	Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma	PENGARUH PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI PARKIR	•Pendapatan Asli Daerah Kota Bantul	•PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI PARKIR			• Variabel Pajak Reklame dan Retribusi Parkir secara simultan berpengaruh terhadap PAD			SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER PROGRAM STUDI

	Wardani. 2014	TERHADAP PENDAPAT AN ASLI DAERAH KABUPATE N BANTUL					Kabupaten Bantul. Untuk uji parsial, variabel pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bantul, namun retribusi parkir berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini, yang paling dominan pengaruhnya tehadap PAD Kabupaten Bantul adalah Retribusi Parkir.			AKUNTANSI- FEB UMS, 25 JUNI 2014 ISBN: 978- 602-70429-2-6
20	Bambang Jatmiko dan Muham mad Farhan	Key Success Factors of Local Revenue Toward City And	•Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta	•Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta			• Pajak daerah berpengaruh psotof terhadap kinerja keuangan daerah.			Repository UMY

		District Government Performance in Yogyakarta		<p>Elemen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak daerah</li> <li>- Retribusi Daerah</li> <li>- Pendapatan Lain-lain</li> <li>- Perusahaan Daerah</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</li> <li>• Pendapatan lain-lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>• Pendapatan dari perusahaan milik daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</li> </ul>			
--	--	---	--	---	--	---	--	--	--

Tabel Operasional Variabel							
Variabel	Konsep	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Skala Ukur	Alat Analisis	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	Menurut Warsito (2001 ; 128) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah	Jumlah penduduk (X1)	1. Penduduk Berusia 17 tahun ketas atau sudah memiliki KTP yang sudah di anggap sebagai wajib pajak	Sekunder	Ratio	Korelasi	
		Pajak Daerah (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Hotel</li> <li>2. Pajak Restoran</li> <li>3. Pajak Hiburan</li> <li>4. Pajak Reklame</li> <li>5. Pajak Penerangan Jalan</li> <li>6. Pajak Parkir</li> <li>7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>8. Pajak Air Tanah</li> <li>9. Pajak Sarang Burung Walet</li> </ol>	Sekunder	Ratio	Korelasi	

Tabel Operasional Variabel							
Variabel	Konsep	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Skala Ukur	Alat Analisis	Keterangan
			10. PBB Pedesaan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
		Pertumbuhan Ekonomi (X3)	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB)	Sekunder	Ratio	Korelasi	
		Belanja Daerah (X4)	1. Belanja Modal a. Belanja tanah b. Belanja peralatan dan mesin c. Belanja bangunan dan gedung	Sekunder	Ratio	Korelasi	



Tabel Operasional Variabel							
Variabel	Konsep	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Skala Ukur	Alat Analisis	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan</li> <li>e. Belanja aset tetap lainnya</li> <li>2. Belanja operasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja pegawai</li> <li>b. Belanja barang</li> <li>c. Belanja hibah</li> <li>d. Belanja bantuan sosial</li> <li>e. Belanja bantuan keuangan</li> </ul> </li> <li>3. Belanja Tak Terduga</li> </ul>				



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 Januari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/48/Kesbangpol/2019  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa  
 Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
 Muhammadiyah Yogyakarta  
 Nomor : 1770/A.4-III/AKT/II/2019  
 Tanggal : 3 Januari 2019  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"KUNCI SUKSES FAKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY (STUDI PADA KABUPATEN BANJARNEGARA)"** kepada:

Nama : ILHAM GILAR WICAKSONO  
 NIM : 20150420093  
 No.HP/Identitas : 082138320726/3471072412960001  
 Prodi/Jurusan : Akuntansi  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
 Yogyakarta  
 Lokasi Penelitian : Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah  
 Waktu Penelitian : 7 Januari 2019 s.d 7 Juli 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
 Jalan Dipayuda No. 30 A Telp. ( 0286 ) 591142  
**BANJARNEGARA 53414**

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY**  
**NOMOR : 070 /07/ BAPERLITBANG / 2019**

- I. Dasar : Surat Kepala Kesbangpollinmas Kabupaten Banjarnegara Nomor : 070/011/KESBANGPOLLINMAS/2019 Tanggal 10 Januari 2019 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian a.n. **ILHAM GILAR WICAKSONO**
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini :  
 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara, menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan / penelitian / pra survei / survei / skripsi / tesis / disertasi / observasi / praktek lapangan / karya ilmiah tersebut di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh Peneliti dengan data sebagai berikut :
1. Nama : **ILHAM GILAR WICAKSONO**
  2. Pekerjaan : Mahasiswa
  3. Alamat Instansi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  4. Alamat Rumah : Jl. Sugengrejo WB 3/ 571
  5. Judul Penelitian : **"Kunci Sukses Faktor Pendapatan asli Daerah Menggunakan Metode Value For Money"**
  6. Lokasi : Kab. Banjarnegara
  7. Penanggungjawab : Dr. Bambang Jatmiko, SE., M.Si
  8. Anggota : -
- III. Ijin Penelitian ini diberikan dengan ketentuan :
- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalahgunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - b. Bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
  - c. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud diminta kepada yang bersangkutan **untuk wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara cq. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara** pada kesempatan pertama.
  - d. Surat Izin Perpanjangan Pelaksanaan Penelitian/Riset/Pra Survei/Praktek ini berlaku dari
  - e. tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 dan dapat diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Banjarnegara  
 Pada Tanggal : 10 Januari 2019



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BAPERLITBANG Kab. Banjarnegara (Sebagai laporan);
2. Badan Pusat Statistik Kab. Banjarnegara
3. BPPKAD Kab. Banjarnegara



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
 3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
 dpmpstp@jatengprov.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/8974/04.5/2019

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/48/Kesbangpol/2019 Tanggal : 3 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ILHAM GILAR WICAKSONO
2. Alamat : Jalan Sugengjeroni WB 3/571
3. Pekerjaan : Mahasiswa

**Untuk** : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : KUNCI SUKSES FAKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY
- b. Tempat / Lokasi : Kabupaten Banjarnegara
- c. Bidang Penelitian : Ekonomi dan Bisnis
- d. Waktu Penelitian : 7 Januari 2019 sampai 07 Juni 2019
- e. Penanggung Jawab : Dr. Bambang Jatmiko, S.E., M.Si.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 07 Januari 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
 3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
[dpmpstp@jatengprov.go.id](mailto:dpmpstp@jatengprov.go.id)

Semarang, 07 Januari 2019

Nomor : 070/12471/2019  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
 Yth. Bupati Banjarnegara  
 U.p Kepala Kantor Kesbangpolinmas  
 Kabupaten Banjarnegara

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/8974/04.5/2019 Tanggal 07 Januari 2019 atas nama ILHAM GILAR WICAKSONO dengan judul proposal KUNCI SUKSES FAKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. PRASEPYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.  
 Pemfina Utama Madya  
 NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Sdr. ILHAM GILAR WICAKSONO

**Tabel : 3.1.7. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**DI Kab. Banjarnegara Tahun 2013**  
*Number of Population by Age Group and Sex*  
*in Banjarnegara 2013*

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	40.775	39.566	80.341
5 - 9	39.322	37.417	76.739
10 - 14	38.688	35.945	74.633
15 - 19	37.869	35.089	72.958
20 - 24	33.602	33.045	66.647
25 - 29	30.838	32.017	62.855
30 - 34	31.829	33.406	65.235
35 - 39	32.371	33.115	65.486
40 - 44	31.734	32.397	64.131
45 - 49	30.178	31.269	61.447
50 - 54	26.889	28.003	54.892
55 - 59	22.871	22.337	45.208
60 - 64	18.324	17.074	35.398
65 - 69	12.991	13.243	26.234
70 - 74	9.401	9.694	19.095
75+	9.537	11.611	21.148
<b>J u m l a h</b>	<b>447.219</b>	<b>445.228</b>	<b>892.447</b>
Tahun 2012	444.837	442.452	887.289
Tahun 2011	438.969	437.245	876.214
Tahun 2010	439.169	433.809	872.978

Sumber Data : BPS Kab. Banjarnegara

**Tabel : 3.1.7.**  
Table

**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Di Kab. Banjarnegara Tahun 2014**  
*Number of Population by Age Group and Sex*  
*in Banjarnegara 2014*

Kelompok Umur Age Group	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	40.984	41.847	82.831
5 - 9	41.344	37.272	78.616
10 - 14	44.856	44.583	89.439
15 - 19	35.084	29.423	64.507
20 - 24	28.644	27.584	56.228
25 - 29	36.976	40.905	77.881
30 - 34	32.292	36.913	69.205
35 - 39	34.589	31.352	65.941
40 - 44	27.923	32.832	60.755
45 - 49	34.724	31.352	66.076
50 - 54	23.555	22.067	45.622
55 - 59	23.329	23.233	46.562
60 - 64	17.520	16.775	34.295
65 - 69	10.584	12.290	22.874
70 - 74	8.782	9.688	18.470
75+	9.188	10.406	19.594
<b>Jumlah</b>	<b>450.374</b>	<b>448.522</b>	<b>898.896</b>
Tahun 2013	447.219	445.228	892.447
Tahun 2012	444.837	442.452	887.289
Tahun 2011	438.969	437.245	876.214

Sumber Data : BPS Kab. Banjarnegara

## KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

**Tabel : 3.1.7.** Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
 Di Kab. Banjarnegara Tahun 2015  
*Number of Population by Age Group and Sex  
 in Banjarnegara 2015*

Kelompok Umur Age Group	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	39.919	38.904	78.823
5 - 9	39.106	37.018	76.124
10 - 14	37.865	35.297	73.162
15 - 19	38.088	35.293	73.381
20 - 24	34.706	33.535	68.241
25 - 29	30.724	31.376	62.100
30 - 34	30.984	32.605	63.589
35 - 39	32.096	33.155	65.251
40 - 44	31.597	32.233	63.830
45 - 49	30.509	31.694	62.203
50 - 54	27.718	29.436	57.154
55 - 59	24.267	24.385	48.652
60 - 64	20.284	18.815	39.099
65 - 69	14.062	13.874	27.936
70 - 74	9.804	10.088	19.892
75+	10.096	12.281	22.377
<b>Jumlah</b>	<b>451.825</b>	<b>449.989</b>	<b>901.814</b>
Tahun 2014	450.374	448.522	898.896
Tahun 2013	447.219	445.228	892.447
Tahun 2012	444.837	442.452	887.289
Tahun 2011	438.969	437.245	876.214

Sumber Data : BPS Kab. Banjarnegara



## POPULATION AND EMPLOYMENT

**Tabel : 3.1.7.**  
Table

**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan  
Jenis Kelamin Di Kab. Banjarnegara Tahun 2016**  
*Number of Population by Age Group and Sex  
in Banjarnegara Regency, 2016*

Kelompok Umur Age Group	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	38.588	37.439	76.027
5 - 9	39.865	37.969	77.834
10 - 14	38.276	36.279	74.555
15 - 19	37.412	34.021	71.433
20 - 24	33.906	32.557	66.463
25 - 29	32.111	32.534	64.645
30 - 34	30.594	31.865	62.459
35 - 39	31.912	33.429	65.341
40 - 44	31.606	32.217	63.823
45 - 49	30.785	31.965	62.750
50 - 54	28.216	29.700	57.916
55 - 59	24.798	25.887	50.685
60 - 64	21.126	19.564	40.690
65 - 69	14.918	14.417	29.335
70 - 74	9.572	9.669	19.241
75+	10.900	13.313	24.213
<b>J u m l a h</b>	<b>454.585</b>	<b>452.825</b>	<b>907.410</b>
Tahun 2015	451.825	449.989	901.814
Tahun 2014	450.374	448.522	898.896
Tahun 2013	447.219	445.228	892.447
Tahun 2012	444.837	442.452	887.289

Sumber Data : BPS Kab. Banjarnegara

## POPULATION AND EMPLOYMENT

**Tabel : 3.1.6.** Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis  
 Di Kab. Banjarnegara Tahun 2017  
 Number of Population by Age Group and Sex  
 in Banjarnegara 2017

Kelompok Umur Age Group	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	40.390	39.381	79.771
5 - 9	39.562	37.469	77.031
10 - 14	38.305	35.719	74.024
15 - 19	38.524	35.717	74.241
20 - 24	35.117	33.937	69.054
25 - 29	31.082	31.752	62.834
30 - 34	31.343	33.006	64.349
35 - 39	32.485	33.564	66.049
40 - 44	31.962	32.618	64.580
45 - 49	30.861	32.076	62.937
50 - 54	28.044	29.788	57.832
55 - 59	24.554	24.666	49.220
60 - 64	20.532	19.039	39.571
65 - 69	14.228	14.035	28.263
70 - 74	9.927	10.209	20.136
75+	10.379	12.646	23.025
<b>J u m l a h</b>	<b>457.295</b>	<b>455.622</b>	<b>912.917</b>
Tahun 2016	454.585	452.825	907.410
Tahun 2015	451.825	449.989	901.814
Tahun 2014	450.374	448.522	898.896
Tahun 2013	447.219	445.228	892.447

Sumber Data : BPS Kab. Banjarnegara



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2013 DAN 2012**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
1	<b>PENDAPATAN</b>	1,241,180,983,000.00	1,279,702,327,966.00	103.10	1,193,098,804,187.00
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	88,557,495,000.00	98,975,180,350.00	111.76	94,271,467,989.00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	12,411,000,000.00	14,159,236,562.00	114.09	13,613,379,687.00
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	25,523,097,000.00	26,005,524,208.00	101.89	25,209,609,960.00
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,850,248,000.00	4,839,654,543.00	99.78	8,611,972,016.00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45,773,150,000.00	53,970,765,037.00	117.91	46,836,506,326.00
1 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1,095,523,884,000.00	1,113,557,362,241.00	101.65	1,004,766,173,448.00
1 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	876,070,787,000.00	879,697,277,639.00	100.41	794,742,431,657.00
1 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak	42,831,316,000.00	45,892,139,410.00	107.15	44,575,702,509.00
1 . 2 . 1 . 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	330,275,000.00	895,942,229.00	271.27	1,039,955,148.00
1 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum	763,426,566,000.00	763,426,566,000.00	100.00	681,395,924,000.00
1 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus	69,482,630,000.00	69,482,630,000.00	100.00	67,730,850,000.00
1 . 2 . 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	186,275,270,000.00	187,940,193,360.00	100.89	168,674,789,000.00
1 . 2 . 2 . 2	Dana Penyesuaian	186,275,270,000.00	187,940,193,360.00	100.89	168,674,789,000.00
1 . 2 . 3	Transfer Pemerintah Provinsi	33,177,827,000.00	45,919,891,242.00	138.41	41,348,952,791.00
1 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33,177,827,000.00	45,919,891,242.00	138.41	41,348,952,791.00
1 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	57,099,604,000.00	67,169,785,375.00	117.64	94,061,162,750.00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	1,251,172,750.00
1 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya	57,099,604,000.00	67,169,785,375.00	117.64	92,809,990,000.00

2	<b>BELANJA</b>	1,405,366,623,000.00	1,175,474,028,855.00	83.64	1,111,145,362,420.00
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,185,182,226,450.00	998,103,253,034.00	84.22	952,244,455,090.00
2.1.1	Belanja Pegawai	876,147,947,100.00	725,744,493,529.00	82.83	683,416,001,802.00
2.1.2	Belanja Barang	212,593,074,350.00	183,100,414,305.00	86.13	190,506,821,530.00
2.1.5	Belanja Hibah	47,162,129,000.00	42,984,831,000.00	91.14	33,276,897,258.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12,205,703,000.00	10,301,440,000.00	84.40	10,192,900,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	37,073,373,000.00	35,972,074,200.00	97.03	34,851,834,500.00
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	214,976,220,550.00	175,918,010,287.00	81.83	158,300,839,118.00
2.2.1	Belanja Tanah	5,961,990,000.00	4,121,803,870.00	69.13	4,656,840,270.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	46,609,770,750.00	31,893,117,313.00	68.43	38,774,698,606.00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	62,891,480,300.00	49,057,705,428.00	78.00	82,291,218,500.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89,596,142,500.00	82,034,757,380.00	91.56	30,360,859,122.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	9,916,837,000.00	8,810,626,296.00	88.85	2,217,222,620.00
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	3,500,000,000.00	37,049,300.00	1.06	109,625,000.00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	3,500,000,000.00	37,049,300.00	1.06	109,625,000.00
2.4	<b>TRANSFER</b>	1,708,176,000.00	1,415,716,234.00	82.88	490,443,212.00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	1,708,176,000.00	1,415,716,234.00	82.88	490,443,212.00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1,708,176,000.00	1,415,716,234.00	82.88	0.00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00	0.00	490,443,212.00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(164,185,640,000.00)	104,228,299,111.00	(63.48)	81,953,441,767.00
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	172,977,105,000.00	173,834,364,426.00	100.50	98,119,742,986.00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	172,977,105,000.00	172,977,104,753.00	100.00	96,361,022,986.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	857,259,673.00	0.00	1,758,720,000.00
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	8,791,465,000.00	8,147,000,000.00	92.67	7,096,080,000.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,327,000,000.00	8,147,000,000.00	97.84	6,986,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	464,465,000.00	0.00	0.00	110,080,000.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	164,185,640,000.00	165,687,364,426.00	100.91	91,023,662,986.00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0.00	269,915,663,537.00	0.00	172,977,104,753.00

Banjarnegara, 1 Januari 2013  
**BUPATI BANJARNEGARA**

**SUTEDJO SLAMET UTOMO**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	<b>PENDAPATAN</b>	1,334,371,529,000.00	1,403,398,262,639.00	69,026,733,639.00	105.17
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	127,171,027,000.00	161,652,537,773.00	34,481,510,773.00	127.11
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29,150,000,000.00	33,766,018,838.00	4,616,018,838.00	115.84
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	30,358,271,000.00	30,095,952,132.00	(262,318,868.00)	99.14
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,790,100,000.00	8,273,386,823.00	1,483,286,823.00	121.84
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60,872,656,000.00	89,517,179,980.00	28,644,523,980.00	147.06
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1,207,200,502,000.00	1,241,745,724,866.00	34,545,222,866.00	102.86
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	913,491,560,000.00	915,782,706,561.00	2,291,146,561.00	100.25
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	26,050,826,000.00	27,283,335,635.00	1,232,509,635.00	104.73
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	330,275,000.00	1,388,911,926.00	1,058,636,926.00	420.53
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	826,044,419,000.00	826,044,419,000.00	0.00	100.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	61,066,040,000.00	61,066,040,000.00	0.00	100.00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	186,275,270,000.00	209,121,660,000.00	22,846,390,000.00	112.26
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	186,275,270,000.00	209,121,660,000.00	22,846,390,000.00	112.26
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	107,433,672,000.00	116,841,358,305.00	9,407,686,305.00	108.76
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36,252,391,000.00	62,150,613,000.00	25,898,222,000.00	171.44
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	71,181,281,000.00	54,690,745,305.00	(16,490,535,695.00)	76.83

2	<b>BELANJA</b>	1,597,580,830,000.00	1,349,769,030,982.00	(247,811,799,018.00)	84.49
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,315,252,481,100.00	1,141,572,941,983.00	(173,679,539,117.00)	86.79
2.1.1	Belanja Pegawai	913,685,212,950.00	799,040,679,582.00	(114,644,533,368.00)	87.45
2.1.2	Belanja Barang	296,971,618,650.00	250,571,611,837.00	(46,400,006,813.00)	84.38
2.1.5	Belanja Hibah	47,987,607,500.00	43,668,654,501.00	(4,318,952,999.00)	91.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17,422,297,000.00	11,610,224,000.00	(5,812,073,000.00)	66.64
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	39,185,745,000.00	36,681,772,063.00	(2,503,972,937.00)	93.61
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	278,165,393,900.00	206,495,161,626.00	(71,670,232,274.00)	74.23
2.2.1	Belanja Tanah	25,147,261,000.00	11,460,736,365.00	(13,686,524,635.00)	45.57
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	47,945,045,500.00	32,763,834,211.00	(15,181,211,289.00)	68.34
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	92,747,733,600.00	80,902,955,591.00	(11,844,778,009.00)	87.23
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	104,110,744,000.00	78,623,718,702.00	(25,487,025,298.00)	75.52
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8,214,609,800.00	2,743,916,757.00	(5,470,693,043.00)	33.40
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	2,500,000,000.00	170,000,000.00	(2,330,000,000.00)	6.80
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2,500,000,000.00	170,000,000.00	(2,330,000,000.00)	6.80
2.4	<b>TRANSFER</b>	1,662,955,000.00	1,530,927,373.00	(132,027,627.00)	92.06
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	1,662,955,000.00	1,530,927,373.00	(132,027,627.00)	92.06
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1,662,955,000.00	1,530,927,373.00	(132,027,627.00)	92.06
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(263,209,301,000.00)	53,629,231,657.00	316,838,532,657.00	(20.38)
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	269,915,801,000.00	270,346,074,653.00	430,273,653.00	100.16
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	269,915,801,000.00	269,915,801,537.00	537.00	100.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	430,273,116.00	430,273,116.00	0.00
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	6,706,500,000.00	5,456,500,000.00	(1,250,000,000.00)	81.36
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,706,500,000.00	5,456,500,000.00	(1,250,000,000.00)	81.36
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	263,209,301,000.00	264,889,574,653.00	1,680,273,653.00	100.64
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0.00	318,518,806,310.00	318,518,806,310.00	0.00

Banjarnegara, 31 March 2014  
**BUPATI BANJARNEGARA**

**SUTEDJO SLAMET UTOMO**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	<b>PENDAPATAN</b>	1,647,678,912,000.00	1,693,503,657,927.00	45,824,745,927.00	102.78
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	142,628,201,000.00	180,561,068,549.00	37,932,867,549.00	126.60
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35,002,500,000.00	38,507,263,101.00	3,504,763,101.00	110.01
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	25,644,620,000.00	25,221,990,217.00	(422,629,783.00)	98.35
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,185,350,000.00	8,784,507,069.00	599,157,069.00	107.32
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73,795,731,000.00	108,047,308,162.00	34,251,577,162.00	146.41
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1,503,800,711,000.00	1,512,447,639,378.00	8,646,928,378.00	100.58
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,040,060,453,000.00	1,023,677,501,207.00	(16,382,951,793.00)	98.42
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	26,050,826,000.00	26,423,084,859.00	372,258,859.00	101.43
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	330,275,000.00	1,002,364,348.00	672,089,348.00	303.49
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	862,810,552,000.00	862,810,552,000.00	0.00	100.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	150,868,800,000.00	133,441,500,000.00	(17,427,300,000.00)	88.45
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	324,284,728,000.00	324,062,228,000.00	(222,500,000.00)	99.93
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	324,284,728,000.00	324,062,228,000.00	(222,500,000.00)	99.93
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	139,455,530,000.00	164,707,910,171.00	25,252,380,171.00	118.11
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54,542,184,000.00	90,807,648,727.00	36,265,464,727.00	166.49
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	84,913,346,000.00	73,900,261,444.00	(11,013,084,556.00)	87.03
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	1,250,000,000.00	494,950,000.00	(755,050,000.00)	39.60
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,250,000,000.00	494,950,000.00	(755,050,000.00)	39.60

2	<b>BELANJA</b>	1,959,994,218,000.00	1,612,219,383,363.00	(347,774,834,637.00)	82.26
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,509,874,258,400.00	1,278,216,153,628.00	(231,658,104,772.00)	84.66
2.1.1	Belanja Pegawai	994,426,781,650.00	858,127,675,650.00	(136,299,106,000.00)	86.29
2.1.2	Belanja Barang	250,470,449,450.00	211,622,005,175.00	(38,848,444,275.00)	84.49
2.1.5	Belanja Hibah	89,955,206,300.00	34,243,515,190.00	(55,711,691,110.00)	38.07
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7,881,000,000.00	7,732,320,000.00	(148,680,000.00)	98.11
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	167,140,821,000.00	166,490,637,613.00	(650,183,387.00)	99.61
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	439,111,010,600.00	329,811,474,920.00	(109,299,535,680.00)	75.11
2.2.1	Belanja Tanah	32,701,361,600.00	17,361,379,957.00	(15,339,981,643.00)	53.09
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	69,369,027,100.00	55,052,871,231.00	(14,316,155,869.00)	79.36
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	119,748,509,600.00	103,285,193,094.00	(16,463,316,506.00)	86.25
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	209,745,313,300.00	152,564,745,788.00	(57,180,567,512.00)	72.74
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7,546,799,000.00	1,547,284,850.00	(5,999,514,150.00)	20.50
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	7,000,000,000.00	326,226,440.00	(6,673,773,560.00)	4.66
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7,000,000,000.00	326,226,440.00	(6,673,773,560.00)	4.66
2.4	<b>TRANSFER</b>	4,008,949,000.00	3,865,528,375.00	(143,420,625.00)	96.42
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	4,008,949,000.00	3,865,528,375.00	(143,420,625.00)	96.42
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	4,008,949,000.00	3,865,528,375.00	(143,420,625.00)	96.42
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(312,315,306,000.00)	81,284,274,564.00	393,599,580,564.00	(26.03)
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	318,518,806,000.00	319,243,575,054.00	724,769,054.00	100.23
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	318,518,806,000.00	318,518,806,310.00	310.00	100.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	724,768,744.00	724,768,744.00	0.00
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	6,203,500,000.00	6,203,500,000.00	0.00	100.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,203,500,000.00	6,203,500,000.00	0.00	100.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	312,315,306,000.00	313,040,075,054.00	724,769,054.00	100.23
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0.00	394,324,349,618.00	394,324,349,618.00	0.00





**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	<b>PENDAPATAN</b>	1,881,785,248,900.00	1,836,015,079,137.00	(45,770,169,763.00)	97.57
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	194,124,474,100.00	221,048,387,512.00	26,923,913,412.00	113.87
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	39,217,500,000.00	41,588,878,900.00	2,371,378,900.00	106.05
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	28,167,341,100.00	26,557,123,984.00	(1,610,217,116.00)	94.28
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27,359,670,000.00	27,392,347,558.00	32,677,558.00	100.12
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99,379,963,000.00	125,510,037,070.00	26,130,074,070.00	126.29
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1,685,323,549,800.00	1,613,382,095,125.00	(71,941,454,675.00)	95.73
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,339,434,190,800.00	1,264,069,069,612.00	(75,365,121,188.00)	94.37
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	31,250,337,000.00	34,067,401,242.00	2,817,064,242.00	109.01
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2,099,610,000.00	1,312,019,655.00	(787,590,345.00)	62.49
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	936,072,487,600.00	976,642,965,000.00	40,570,477,400.00	104.33
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	370,011,756,200.00	252,046,683,715.00	(117,965,072,485.00)	68.12
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	172,884,303,000.00	172,884,303,000.00	0.00	100.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	172,884,303,000.00	172,884,303,000.00	0.00	100.00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	173,005,056,000.00	176,428,722,513.00	3,423,666,513.00	101.98
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80,580,056,000.00	87,805,222,513.00	7,225,166,513.00	108.97
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	92,425,000,000.00	88,623,500,000.00	(3,801,500,000.00)	95.89
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	2,337,225,000.00	1,584,596,500.00	(752,628,500.00)	67.80
1.3.1	Pendapatan Hibah	2,337,225,000.00	1,584,596,500.00	(752,628,500.00)	67.80

2	<b>BELANJA</b>	2,252,497,097,900.00	2,017,382,964,152.00	(235,114,133,748.00)	89.56
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,690,142,755,500.00	1,523,894,184,597.00	(166,248,570,903.00)	90.16
2.1.1	Belanja Pegawai	1,004,046,298,500.00	898,952,688,456.00	(105,093,610,044.00)	89.53
2.1.2	Belanja Barang	322,391,363,900.00	274,525,640,791.00	(47,865,723,109.00)	85.15
2.1.5	Belanja Hibah	74,750,940,100.00	63,317,633,110.00	(11,433,306,990.00)	84.70
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17,009,000,000.00	16,154,575,000.00	(854,425,000.00)	94.98
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	271,945,153,000.00	270,943,647,240.00	(1,001,505,760.00)	99.63
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	554,753,218,400.00	487,535,630,129.00	(67,217,588,271.00)	87.88
2.2.1	Belanja Tanah	20,000,303,500.00	8,664,687,620.00	(11,335,615,880.00)	43.32
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	60,211,306,900.00	51,624,046,855.00	(8,587,260,045.00)	85.74
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	106,470,754,650.00	93,251,864,041.00	(13,218,890,609.00)	87.58
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	364,834,908,850.00	330,941,485,613.00	(33,893,423,237.00)	90.71
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,235,944,500.00	3,053,546,000.00	(182,398,500.00)	94.36
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	2,500,000,000.00	995,105,426.00	(1,504,894,574.00)	39.80
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2,500,000,000.00	995,105,426.00	(1,504,894,574.00)	39.80
2.4	<b>TRANSFER</b>	5,101,124,000.00	4,958,044,000.00	(143,080,000.00)	97.20
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5,101,124,000.00	4,958,044,000.00	(143,080,000.00)	97.20
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	5,101,124,000.00	4,958,044,000.00	(143,080,000.00)	97.20
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(370,711,849,000.00)	(181,367,885,015.00)	189,343,963,985.00	48.92
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	394,324,349,000.00	400,471,589,332.00	6,147,240,332.00	101.56
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	394,324,349,000.00	394,324,349,618.00	618.00	100.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	6,147,239,714.00	6,147,239,714.00	0.00
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	23,612,500,000.00	23,612,500,000.00	0.00	100.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23,612,500,000.00	23,612,500,000.00	0.00	100.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	370,711,849,000.00	376,859,089,332.00	6,147,240,332.00	101.66
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0.00	195,491,204,317.00	195,491,204,317.00	0.00

Banjarnegara, 1 January 2016  
**BUPATI BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	<b>PENDAPATAN</b>	2,172,223,792,000.00	2,167,801,161,490.00	(4,422,630,510.00)	99.80
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	277,400,917,500.00	297,485,382,003.00	20,084,464,503.00	107.24
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	44,928,000,000.00	48,468,199,275.00	3,540,199,275.00	107.88
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	31,122,219,500.00	29,696,773,430.00	(1,425,446,070.00)	95.42
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,186,477,000.00	11,231,741,849.00	45,264,849.00	100.40
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190,164,221,000.00	208,088,667,449.00	17,924,446,449.00	109.43
1 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1,893,918,421,000.00	1,869,130,576,787.00	(24,787,844,213.00)	98.69
1 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,456,323,738,000.00	1,421,124,445,787.00	(35,199,292,213.00)	97.58
1 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak	34,193,667,000.00	36,294,722,058.00	2,101,055,058.00	106.14
1 . 2 . 1 . 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2,226,826,000.00	1,407,972,386.00	(818,853,614.00)	63.23
1 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum	959,486,489,000.00	959,486,489,000.00	0.00	100.00
1 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus	460,416,756,000.00	423,935,262,343.00	(36,481,493,657.00)	92.08
1 . 2 . 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	268,192,438,000.00	268,192,438,000.00	0.00	100.00
1 . 2 . 2 . 2	Dana Penyesuaian	268,192,438,000.00	268,192,438,000.00	0.00	100.00
1 . 2 . 3	Transfer Pemerintah Provinsi	169,402,245,000.00	179,813,693,000.00	10,411,448,000.00	106.15
1 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	87,787,855,000.00	100,371,692,000.00	12,583,837,000.00	114.33
1 . 2 . 3 . 2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	81,614,390,000.00	79,442,001,000.00	(2,172,389,000.00)	97.34
1 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	904,453,500.00	1,185,202,700.00	280,749,200.00	131.04
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	904,453,500.00	1,185,202,700.00	280,749,200.00	131.04

2	<b>BELANJA</b>	2,355,088,391,000.00	2,178,823,342,905.00	(176,265,048,095.00)	92.52
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,734,399,222,000.00	1,610,189,360,347.00	(124,209,861,653.00)	92.84
2.1.1	Belanja Pegawai	935,372,717,000.00	869,864,848,350.00	(65,507,868,650.00)	93.00
2.1.2	Belanja Barang	393,800,150,500.00	347,949,050,226.00	(45,851,100,274.00)	88.36
2.1.5	Belanja Hibah	58,578,330,500.00	42,451,333,461.00	(16,126,997,039.00)	72.47
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	23,354,953,000.00	27,110,688,880.00	3,755,735,880.00	116.08
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	323,293,071,000.00	322,813,439,430.00	(479,631,570.00)	99.85
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	612,925,794,000.00	562,843,385,558.00	(50,082,408,442.00)	91.83
2.2.1	Belanja Tanah	23,114,517,000.00	5,620,673,271.00	(17,493,843,729.00)	24.32
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	91,694,953,242.00	78,070,744,705.00	(13,624,208,537.00)	85.14
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	97,032,240,032.00	94,246,502,690.00	(2,785,737,342.00)	97.13
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	377,073,984,700.00	362,053,265,708.00	(15,020,718,992.00)	96.02
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	24,010,099,026.00	22,852,199,184.00	(1,157,899,842.00)	95.18
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	2,500,000,000.00	527,738,000.00	(1,972,262,000.00)	21.11
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2,500,000,000.00	527,738,000.00	(1,972,262,000.00)	21.11
2.4	<b>TRANSFER</b>	5,263,375,000.00	5,262,859,000.00	(516,000.00)	99.99
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5,263,375,000.00	5,262,859,000.00	(516,000.00)	99.99
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	5,263,375,000.00	5,262,859,000.00	(516,000.00)	99.99
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(182,864,599,000.00)</b>	<b>(11,022,181,415.00)</b>	<b>171,842,417,585.00</b>	<b>6.03</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	195,491,204,000.00	195,898,562,898.00	407,358,898.00	100.21
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	195,491,204,000.00	195,491,204,317.00	317.00	100.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	407,358,581.00	407,358,581.00	0.00
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	12,626,605,000.00	12,626,605,000.00	0.00	100.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12,626,605,000.00	12,626,605,000.00	0.00	100.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>182,864,599,000.00</b>	<b>183,271,957,898.00</b>	<b>407,358,898.00</b>	<b>100.22</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>172,249,776,483.00</b>	<b>172,249,776,483.00</b>	<b>0.00</b>



**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
 Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Ilham Gilar Wicaksono  
 NIM : 20150420093  
 Prodi : Akuntansi  
 Judul : KUNCI SUKSES FAKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY  
 (Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara)  
 Dosen Pembimbing : Dr. Bambang Jatmiko, S.E., M.Si.

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 10%.  
 Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui  
 Ka. Ur. Pengolahan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 17-07-2019  
 yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al- Zein, S.Kom.I